

## A. BUKU

- Asri, Sariana (2020). *Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Menanggulangi Sengketa Hak Atas Tanah di Kecamatan Kajang (Telaah Suyasah Syar'iyah)*. Skripsi. Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Bungin, M. Burhan (2008). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta : Kencana
- Cresswell, John, W. (2015). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, dan Desain Riset*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danial, Endang dan Nanan, Wasriah (2009). *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan
- Danim, Sudarwan (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung : Pustaka Setia
- Dunn, N. William (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Penerjemah : Samodra Wibawa, Edisi ke-2, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Farida, I.A. (1996). *Manajemen Konflik pada remaja yang tinggal bersama orang tua dan remaja panti di Malang* . Yogyakarta : Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada
- Fajar, Farhan. (2011). *Upaya Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan (Kasus Konflik Penguasaan Tanah Blang Padang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh)*. Tesis. Program Studi magister Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada. Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Fausi, Ahmad (2020). *Strategi Mediasi Badan Pertanahan Nasional Jember dalam Penyelesaian Konflik Tanah (Studi Deskriptif di Desa Curahnongko Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember)*. Skripsi. Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIPOL Universitas Jember.
- Fisher, S; D.I. Abdi; J.Ludin; R. Smith; S. Williams & S. Williams; (2001). *Mengelola Konflik : Kemampuan dan Strategi untuk Bertindak*. S.N. Kartikasari M.D.Tapilatu; R.Maharani & D.N.Rini (Penterjemah), Jakarta : The British Council
- Fox, Anne (2009). *Mengendalikan Konflik : Tips, Taktik dan Teknik*. Surabaya : Selasar Publishing

- Handayaniingrat, Soewarno (1994). *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta : CV. Haji Masagung
- Handoko, T.Tani (2001). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta : BPFE, Universitas Gadjah Mada
- Hartati, Sri (2020). *Peran Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam Konflik Pertanahan di Perbatasan Wilayah Desa Kota Garo Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan*. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru - Riau.
- Ikaningtyas, D.A.A. (2013). *Produksi Beras Di Delanggu Pada Masa Orde Baru 1968-1984*. Tesis. Program Studi Sejarah, Universitas Gadjah Mada. Diakses dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>
- Indriasari, Rima (2021). *Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Kepentingan Umum Melalui Mediasi*. Skripsi. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawan, Agung (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Malihah, Elli. (2007). *Konflik dan Integrasi SKL*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mahmudi (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Manuel, S. Fridorianus (2020). *Status Hukum Hutan Pubabu di Desa Linamutu, Kecamatan Amanuban Selatan – Kabupaten Timor Tengah Selatan : Studi Analisis berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Hutan Adat*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Katolik Widya Mandira
- Miles, B. Mathew dan Huberman, Michael A. (1992). *Analisis Data Kualitatif : Buku sumber tentang metode-metode baru*. Penerjemah : Tjetjep Rohendi, Pendamping : Mulyarto, Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press)
- Martani, Huseini dan Lubis, S.B. Hari (1987). *Teori Organisasi*. Bandung : Ghalia Indonesia

KAROLINA K H MANGGOL, Dafri Agussalim, Dr., M.A  
Nugroho Heru (2022) *Agar Mewujudkan Pemberdayaan Hak – hak atas Tanah*. Bandung : CV. Mandar Maju

Pasolong, Harbani (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta

Poloma, M.M. (2007). *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Rahmah, R.D (2016). *Metode Resolusi Konflik dalam Perjanjian Kerjasama antar Aktor Governance tentang Pembangunan Kolam Renang dan Jalan Raya Penghubung Citra Raya-Unesa-Middle Ring Road di Kota Surabaya*. Disertasi. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga

Ruslan, Email (2005). *Paradigma Teori Konflik : Telaah Kritis Teori Konflik Marx, Jurnal Refleksi, Kajian Ilmiah Ilmu Sosial dan Kemasyarakatan*. Bandung : Unpad Press

Salindeho, John. (1994). *Manusia, Tanah, Hak dan Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Setiyawan, Heru (2020). *Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Tanah sesuai Peraturan Menteri Agraria No.11 tahun 2016 di Kantor Pertanahan Kota Tegal*. Skripsi. Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.

Sibuea, Hotma.P (2010). *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta : Erlangga

Silalahi, U. Rachmawati.T, Wicaksono, K.W dan Herwanto, T.S (2017). *Handbook Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Administrasi Publik*. Bandung : Unpar Press

Steers, M. Richard (1980). *Efektivitas Organisasi*. Terjemahan : Magdalena Jamin, Jakarta : Erlangga

Sumarjono, M.S (2013). *Konflik Agraria : Pengelolaan Sumber Daya Air*. Absolute Media

Susan, Novri (2009). *Pengantar Sosiologi Konflik*. Jakarta : Kencana

Susan, Novri (2010). *Sosiologi Konflik dan Isu – isu Konflik Kontemporer*. Jakarta : Kencana

Susan, Novri (2019). *Sosiologi Konflik : Teori – Teori dan Analisis*. Edisi Ketiga, Cetakan ke-4. Jakarta : Prenadamedia Group

Umar, Nufriana (2020). *Pelaksanaan Tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Bone dalam Menyelesaikan Sengketa Batas Tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*

Wirawan, I.B. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Salemba Empat

Wirawan, I.B. (2013). *Teori – Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial)*. Cetakan ke-2. Jakarta : Kencana Prenda Media Group

Winardi. (1994). *Manajemen Konflik (Konflik Perubahan dan Pengembangan)*. Bandung : CV. Mandar Maju

## B. JURNAL & ARTIKEL

Abdalla, Amir dan Sender Marie (2019). *C.R SIPPABIO : a Model for Conflict Analysis* : [https://www.academia.edu/28362021/C\\_R\\_SIPPABIO\\_A\\_Model\\_for\\_Conflict\\_Analysis](https://www.academia.edu/28362021/C_R_SIPPABIO_A_Model_for_Conflict_Analysis)

Adiansah, Wandu. (2019). Resolusi Konflik Agraria di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1 – 70. Volume 1 Nomor 1. ISSN : 2655-8823 (p)

Amaliyah. Ma'ruf, A.M. Sary, N dan Bitu, G.Syahril (2021). Reforma Agraria dan Penanganan Sengketa Tanah. *Jurnal Hermeneutika*, Volume 5 Nomor 1, Februari 2021 : ISSN 2337-6368, DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Dhosa, Dedi Didimus (2021). State-led Forest Development and Social Protest in East Nusa Tenggara Province. *Forest and Society Journal*, 288 – 303. Volume 5 (2) : <http://dx.doi.org/10.24259/fs.v5i2.11320>

Fajar, Farhan (2016). Upaya Dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan (Studi Kasus Konflik Penguasaan Tanah Blang Padang Kota Banda Aceh Provinsi Aceh). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Volume 6 Edisi 2 : <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v6i2.143>

Haryanto, Y. Sumardjo, Amanah, S dan Tjitropranoto, P (2017). Efektivitas Peran Penyuluh Swadaya dalam Pemberdayaan Petani di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian*, Volume 20 Nomor 2 , Juli 2017 : 141 – 154, ISSN 2528-0791

Herry, Musleh. (2011). Kewenangan Pemerintah Daerah Bidang Pertanahan di Era Otonomi Daerah. *Journal de Jure : Jurnal Syariah dan Hukum*, hal. 47 – 57. Volume 3 Nomor 1. Juni 2011 ISSN : 2655-8823 (p) DOI:10.18860/j-fsh.v3i1.1319

Hutaharai, N.H, Siobang, W.E dan Siandaton, T (2021). Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah. *PATIK : Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 01, April 2021*, page 61 – 68. p-ISSN : 2086-4434

Irwandi, Irwandi dan Chotim, R. Endah (2017). Analisis Konflik antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta. *JISPO : Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 7 Nomor 2. p-ISSN : 2303-3169, e-ISSN : 2579-3098*

Kurniati, Nia dan Fakhriah, L.Efa (2017). BPN sebagai Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca Perkaban No.11 tahun 2016. *SOSIOHUMANIORA : Journal of Sciences and Humanities* , 95-105, Volume 19 Nomor 2, Mei 2021, ISSN : 1411-0911, âDOI : <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.11999>

Kurniawan, Dedi dan Syani, Abdul (2014). Faktor Penyebab, Dampak dan Strategi Penyelesaian Konflik antar warga di Kecamatan way Panji, Kabupaten Lampung Selatan. *GARUDA : Jurnal Sosiologi* , 1-12, Volume 15 Nomor 1, April 2014

Kusumojati, P. Mega dan Rosando, F. Abraham (2021). Peran Badan Pertanahan dalam Mereduksi Konflik dan Perkara Sengketa Tanah melalui Mediasi. *COURT REVIEW : Jurnal Penelitian Hukum, Volume 1 Nomor 03, Mei 2021*, page 16 – 34. e-ISSN : 2776-1916

Lebe, G.A. Kumampung, M.R.Tommy dan Muaja S.Harly (2021). Pembatalan Sertifikat Hak atas Tanah menurut Peraturan Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan. *Jurnal Lex Privatum - Universitas Sam Ratulangi*, Volume 9 Nomor 5 : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/33491>

Lengkong, Y.Feibe, Palilingan, N. Toar dan Muaja S.Harly (2020). Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. *Jurnal Lex Privatum - Universitas Sam Ratulangi*, Volume 8 Nomor 4, Okt-Des 2020 : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/30973>

Mardianto, A. Koentjoro dan Purnamaningsih E.H (2000). Penggunaan Manajemen Konflik ditinjau dari status Keikutsertaan dalam Mengikuti Kegiatan Pencinta Alam di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. *Jurnal Psikologi - Universitas Gadjah Mada*, 111 – 119. ISSN : 0215-8884

Mulyadi, D.H. dan Rusydi, Ibnu (2017). Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Komunida : Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5 Nomor 1, Maret 2017 : <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/viewFile/235/227>

Negara, C.N. Tippe, S. dan Wahyudi, B. (2019). Resolusi Konflik Lahan di Kecamatan Bulupesantren Kabupaten Kebumen. *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik – Universitas Pertahanan RI*, Volume 5 Nomor 1, April 2019 <http://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/DRK/article/view/352>

Ngadimin, Kusmanto, Heri dan Isnaini (2018). Peran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam Proses Penyelesaian Permasalahan Sengketa/Konflik Areal Lahan. *JPPUMA : Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Volume 6 Nomor 1, 2018, ISSN : 2549-1660, e-ISSN : 2550 - 1305

Nilamsari, Natalina. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana : Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, Volume XIII Nomor 2, Juni 2014. hal. 177 – 181.: <http://journal.moestopo.ac.id/index.php/wacana/article/download/143/88>

Nuriyanto, N. (2020). Urgensi Reforma Agraria; Menuju Penataan Penggunaan Tanah Yang Berkeadilan Sosial. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 29-45. <http://jurnal.stkipppgritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/1551>

Parayitam, S. dan Papenhausen, C. (2017). Strategic Decision – Making : The Effects of cooperative conflict management, agreement – seeking behavior and competence based trust on decisions outcomes. *Emerald Insight : Management Research Review*, 2 – 28. Volume 41 Nomor 1. DOI 10.1108/MRR-12-2016-0285

Poros, M. Stivani. Imron Ali dan Shanty, Y. Wika (2017). Perlindungan Hukum Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat terhadap Tindakan Individualisasi Tanah Ulayat untuk Tujuan Komersial. *Bhirawa Law Journal*, Volume 2 Issue 1. May 2021. ISSN Online : 2775-2070, ISSN Cetak : 2775-4464



- Rahman, Ratna. (2017). Konflik Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus Sengketa Tanah Adat). *Sosioreligius : Jurnal UIN-Alaudin*. Volume 2 Nomor 1 Juni 2017 : <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Sosioreligius/article/view/5997>
- Raja, Azizah Nur. (2019). Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria ( Studi Kasus Konflik antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di Kabupaten Bulukumba). *Government : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 53 – 66. Volume 12 Nomor 1. e-ISSN : 2503-4952
- Resie, Ananta Martinus (2021). Analisis Dinamika Konflik Agraria BPN dan PT. KAI, Pemerintah Daerah Kota Semarang dengan Masyarakat Kebonharjo. *Journal of Politic and Government Studies*, 344 – 359. Volume 10 Nomor 3, Periode Wisuda Agustus 2021
- Rizki, A. Dinda dan Putranto, D.K. Arif (2018). Evaluasi Penyelesaian Konflik Penambangan Pasir di Daerah Aliran Sungai (DAS) Progo di Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul. *PARADIGMA : Jurnal Ilmu Administrasi*, 165 – 181. Volume 7 Nomor 2, Desember 2018, p-ISSN : 2301 – 5497, e-ISSN : 2549 - 8460
- Rosyana, R.A.Firda. Dermawan Windy dan Akim (2019). Coflict Resolution in South Sudan. *Jurnal ICMES : The Journal of Middle East Studies*, 53 – 74. Volume 3 Nomor 1. Juni 2019 e-ISSN : 2621-7341
- Saputro, Doni. Setiajid dan Susanti H.M (2017). Peran Kantor Pertanahan dalam Penyelesaian Sengketa Tanah antara Masyarakat Desa Pakis dengan Perhutani Kabupaten Kendal. *Unnes Political Science Journal*, pp. 135 – 142. ISSN : 2549 – 0737
- Sari, A.M.Cut. Y. Hasan, E. Ubaidulla. Fadlia, F dan Ardiansyah (2018). Analisis Model SIPABIO dalam Pemetaan Potensi Konflik Menjelang Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kabupaten Aceh. *Talenta Conference Series : Local Wisdom, Social & Arts (LWSA)* Volume 1 Issue 2 , ISSN 2654-7058, DOI 10.32734/lwsa.v1i2.214
- Somadiyono, Sigit (2017). Peran Kantor Wilayah Provinsi Jambi dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui Mekanisme Mediasi. *Wajah Hukum* Volume 1 Nomor 1, Oktober 2017 e-ISSN 2598-604X, DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v1i1.16>

Sujanto, A. Bifenda (2017). The Effectiveness of Disaster Management Volunteer Role in East Jakarta Flood Emergency Response in Terms of Human Victims Rescue (Study at Kampung Melayu in 2014). *Jurnal Prodi Manajemen Bencana*, Volume 3 Nomor 2, Agustus 2017 : ISSN (e) : 2716-4462 DOI: <https://doi.org/10.33172/jmb.v3i2.104>

Tamudin, M. (2018). Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan di Daerah sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak Warga Negara. *Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 125 – 136. e-ISSN : 2460-9102 18 (1)

Thontowi, H.Ahmad (2012). Manajemen Konflik. *Kumpulan Artikel/Tulisan Widyaiswara Kanwil Kemenag Sumatera Selatan* : <https://sumsel.kemenag.go.id/artikel/view/11414/file/dokumen/file/dokumen/index.php?s=manajemen+konflik#>

Tumanduk, J.R Brandon, Wahongan, S.Anna dan Roeroe, L.D Sarah (2021). Kewenangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) terhadap Penyelesaian Perkara Pertanahan ditinjau dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. *LEX ADMINISTRATUM : Jurnal Elektronik Bagian Hukum Administrasi Negara – Fakultas Hukum Unsrat*, Volume IX Nomor 2, Maret 2021, ISSN : 2337-6074

Yaqinah, N Siti. (2019). Resolusi Konflik Sosial melalui Pendekatan Komunikasi di Lingkungan Monjok dan Karang Taliwang Kota Mataram. *Komunida : Media Komunikasi dan Dakwah*, hal. 210 – 234. ISSN : 2088-0669

### C. WEBSITE

aman.or.id.(13 Januari 2021).Catatan Akhir Tahun 2020 Resiliensi Masyarakat Adat di Tengah Pandemi Covid-19 Agresi Pembangunan dan Krisis Hak Asasi Manusia : [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020\\_AMAN.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2021/01/CATATAN-AKHIR-TAHUN-2020_AMAN.pdf)

antaranews.com (15 Oktober 2020) “Konflik Memperebutkan Lahan kembali terjadi di NTT” : <https://www.antaranews.com/berita/1788701/kasus-di-besipae-dinilai-ketidakmampuan-pemprov-ntt-selesaikan-konflik>



KAROLINA K H MANGGOL, Dafri Agussalim, Dr., M.A  
antarenews.com (17 Oktober 2020) “Kasus di Besipae dinilai ketidakmampuan Pemprov NTT selesaikan konflik” :  
<https://www.antarenews.com/berita/1788701/kasus-di-besipae-dinilai-ketidakmampuan-pemprov-ntt-selesaikan-konflik>

atrbtn.go.id (22 januari 2021) “Percepat Penyelesaian Konflik, Pemerintah Lakukan Kajian Konflik Pertanahan di Indonesia” :  
Badan Litbang Kemendagri Cari Solusi Konflik Pertanahan  
<https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=XE0I3593CITIBp2wKssvz3wbAr/6wlEkRPdSIuA9I8sR3/bbaR76amzI/6B7HL+M>

cnnindonesia.com (16 Oktober 2020) “Komnas HAM minta Viktor Laiskodat Setop Kekerasan di Besipae ” :  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201016135248-20-559217/komnas-ham-minta-viktor-laiskodat-setop-kekerasan-di-besipae>

cnnindonesia.com (17 Oktober 2020) “Konflik Lahan Besipae NTT berujung Emak-emak ditendang” :  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201016193334-20-559407/konflik-lahan-besipae-ntt-berujung-emak-emak-ditendang>

dionbata.com. “Ingat Fernandez, Ingat Gempar dan Gerbades” :  
<http://www.dionbata.com/2014/10/ingat-fernandez-ingat-gempar-dan.html>

dukcapil.kemendagri.go.id. “Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan” :  
[https://dukcapil.kemendagri.go.id/files/PERMENDAGRI/2017/PERMENDAGRI\\_NO\\_137\\_TAHUN\\_2017.pdf](https://dukcapil.kemendagri.go.id/files/PERMENDAGRI/2017/PERMENDAGRI_NO_137_TAHUN_2017.pdf)

hukumonline.com. “Percepat Selesaikan Konflik Agraria, ini Langkah Pemerintah” diakses 29 Juli 2021:  
<https://www.hukumonline.com/berita/a/percepat-selesaikan-konflik-agraria--ini-langkah-pemerintah-lt610249c390464>

kbbi.kemdikbud.go.id

komnasperempuan.go.id. (16 Oktober 2020). Siaran Pers Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan tentang Kekerasan Berulang terhadap Perempuan Adat dalam Penyelesaian Konflik Hutan Pubabu Besipae, NTT.  
<https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-kekerasan-berulang-terhadap-perempuan-adat-dalam-penyelesaian-konflik-hutan-pubabu-besipae-ntt-16-oktober-2020>

komnasham.go.id (30 September 2020). “Upaya Komnas HAM Tangani

Konflik Lahan di NTT” :

<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/9/30/1581/upaya-komnas-ham-tangani-konflik-lahan-di-ntt.html>

kompas.com (6 Januari 2021). Sengketa Tanah April – September Surplus, Anomali di tengah Pandemi :

<https://www.kompas.com/properti/read/2021/01/06/123355221/sengketa-tanah-april-september-surplus-anomali-di-tengah-pandemi>

kompasiana.com (8 November 2021). Banu, Hukum Adat Konservasi Lingkungan Hidup Suku Dawan (Timor) :

<https://www.kompasiana.com/neno1069/6082d9a4d541df72b01e9da2/banu-hukum-adat-konservasi-lingkungan-hidup-suku-dawan-timor>

kpa.or.id.(6 Januari 2021).Catatan Akhir Tahun 2020 Konsorsium Pembaruan Agraria, Edisi Peluncuran I : Laporan Konflik Agraria di Masa Pandemi dan Krisis Ekonomi – Pandemi Covid 19 dan Perampasan Tanah Berskala Besar :

<http://kpa.or.id/publikasi/baca/laporan/92/>

kumparan.com (30 November 2020) “Sejarah Perkembangan Reboisasi Hutan di Indonesia” : <https://kumparan.com/firmanda-dwi-septiawan-1602556724700860660/sejarah-perkembangan-reboisasi-hutan-di-indonesia-1ugg9AHFLRX/full>

kupang.tribunnews.com (18 Mei 2020) “Ibu – ibu Bertelanjang Dada” : <https://kupang.tribunnews.com/2020/05/18/ibu-ibu-bertelanjang-dada>

kupang.tribunnews.com (19 Juni 2021) “Akhir Masa Jabatan 2022, Rektor UNDANA minta Fungsikan Kawasan Besipae” : <https://kupang.tribunnews.com/2020/10/16/walhi-ntt-sebut-ada-darurat-kemanusiaan-di-pubabu-besipae>

kupang.tribunnews.com (16 Oktober 2020) “Walhi NTT sebut ada darurat kemanusiaan di Besipae” : <https://kupang.tribunnews.com/2020/10/16/walhi-ntt-sebut-ada-darurat-kemanusiaan-di-pubabu-besipae>

kupang.tribunnews.com (21 Agustus 2020) “Warga Besipae Masih Bertahan di Tenda Darurat” : <https://kupang.tribunnews.com/2020/08/21/warga-besipae-masih-bertahan-di-tenda-darurat>

liputan6.com (21 Agustus 2020). "Tarik-tarikan Hak Kepemilikan Hutan Adat Pubabu, Warga Besipae jadi korban ?" : <https://www.liputan6.com/regional/read/4335051/tarik-tarikan-hak-kepemilikan-hutan-adat-pubabu-warga-besipae-jadi-korban>

litbang.kemendagri.go.id (22 januari 2021) "Webinar Kajian Konflik Pertanahan di Indonesia" : Badan Litbang Kemendagri Cari Solusi Konflik Pertanahan  
<https://litbang.kemendagri.go.id/website/badan-litbang-kemendagri-cari-solusi-konflik-pertanahan/>

pegiatliterasi.com. "12 Catatan Sejarah tentang Proses Panjang Tanah Besipae menjadi Sentral Peternakan Terbesar di NTT yang kini jadi Konflik antara Pemprov NTT dengan Warga Besipae" : <https://www.pegiatliterasi.com/2020/08/sejarah-dan-konflik-tanah-besipae-di-tts.html>

ppid.atrbpn.go.id "Visi dan Misi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional" : <https://ppid.atrbpn.go.id/bpn/page/details/informasi-berkala?level1=0&level2=6>

radarntt.co (18 Mei 2020) "Riwayat Besipae dan Kronologi Penertiban Aset" : <https://radarntt.co/news/2020/riwayat-besipae-dan-kronologi-penertiban-aset/>

rri.co.id "BPN sempurnakan Regulasi terkait Penyelesaian Kasus Pertanahan" Diakses 4 Desember 2021 : <https://rri.co.id/ekonomi/847283/bpn-sempurnakan-regulasi-terkait-penyelesaian-kasus-pertanahan/>

researchgate.net (Januari 2010). Sumber Makanan dan Air di Desa Linamnutu : Sebuah Penelitian Awal Laporan Teknis Lapangan 23 November – 5 Desember 2009 , Affiliation Charles Darwin University, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Satya Wacana DOI:10.13140/RG.2.1.4574.7686  
[https://www.researchgate.net/publication/282246232\\_Sumber\\_Makanan\\_dan\\_Air\\_di\\_Desa\\_Linamnutu\\_Sebuah\\_Penelitian\\_Awal\\_Laporan\\_Teknis\\_Lapangan\\_23\\_November\\_-\\_5\\_Desember\\_2009](https://www.researchgate.net/publication/282246232_Sumber_Makanan_dan_Air_di_Desa_Linamnutu_Sebuah_Penelitian_Awal_Laporan_Teknis_Lapangan_23_November_-_5_Desember_2009)

solidaritasperempuan.org (24 November 2021). Kronologi Konflik Masyarakat Adat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur : <https://www.solidaritasperempuan.org/kronologi-konflik-masyarakat-adat-pubabu-dengan-pemerintah-provinsi-nusa-tenggara-timur/>

walhi.or.id.Belajar dari Masyarakat Adat Pubabu :  
<https://www.walhi.or.id/belajar-dari-masyarakat-adat-pubabu>

#### D. REGULASI

1. Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN)
11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.22/Menhut-V/2007 tentang Pedoman Teknis Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN-RHL/Gerhan)
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan
16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

1. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.
2. Laporan WALHI NTT : Kronologi Konflik Masyarakat Pubabu dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Laporan WALHI NTT : Kronologi Konflik Kepemilikan Hutan yang mengakibatkan Penggusuran
4. Laporan WALHI NTT : Kronologi Tindakan Penggusuran oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Hutan Adat Pubabu
5. Laporan WALHI NTT : Kronologi Penangkapan Masyarakat Adat Pubabu (Saudara Anton Tanu dan Bapak Kornelius Nomleni) oleh Pihak Berwajib